

Audit Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Temanggung Dalam Kegiatan Desa Tangguh Bencana

¹Achmad Bernadi, ²Puji Lestari**, ³Senja Yustitia

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

³Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: pujilestarikom@gmail.com

Abstrak

Program Destana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Temanggung bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana melalui komunikasi kebencanaan. BPBD Temanggung memastikan efektivitas program ini dengan melakukan evaluasi berkala terhadap tahap persiapan, pelaksanaan, dan hasil, serta identifikasi kekurangan untuk perbaikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program Destana tahun 2019 menggunakan audit komunikasi dan Teori Informasi Organisasi, dengan pendekatan kualitatif studi deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program sesuai dengan SOP program Destana, terjadi hambatan akibat lemahnya koordinasi dan komunikasi antara BPBD dan masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengembangkan program secara mandiri setelah pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Audit Komunikasi, Komunikasi Efektif, Program Destana*

Abstract

The Destana program implemented by BPBD Temanggung aims to raise public awareness of disaster risks through disaster communication. BPBD Temanggung ensures the effectiveness of this program by conducting regular evaluations of the preparation, implementation, and outcomes stages, as well as identifying shortcomings for improvement. This study aims to analyze the implementation of the Destana program in 2019 using communication audit and Organizational Information Theory, employing a descriptive qualitative approach through interviews and documentation. The study's results indicate that although the program's implementation adhered to the Destana program SOP, there were obstacles due to weak coordination and communication between BPBD and the community, which resulted in the community's inability to independently develop the program after its implementation.

Keywords: *Communication Audit, Destana Program, Effective Communication*

PENDAHULUAN

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah berupaya untuk mengurangi risiko bencana dengan mengembangkan program berbasis komunitas yang disebut Destana sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Program Destana adalah kegiatan komunikasi berupa sosialisasi mengenai pengetahuan kebencanaan yang didasarkan menurut kerentanan wilayah desa sasaran. Selain itu juga dilakukan kegiatan pelatihan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia untuk mengurangi risiko.

Sosialisasi dan pelatihan adalah sebuah gerakan edukasi yang dilakukan untuk merubah paradigma masyarakat yang masih menganggap bencana sebagai kejadian yang harus diterima begitu saja, tetapi dapat juga dilakukan pencegahan kejadian, meminimalisir dampak maupun jatuhnya korban. Program ini difokuskan pada pengembangan desa dan kelurahan yang tahan terhadap bencana. Program ini melibatkan banyak wilayah administrasi setingkat desa atau kelurahan di Indonesia, yang mencapai jumlah besar, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018. Program pengurangan risiko bencana tersebut diwujudkan melalui pengembangan desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang tangguh terhadap bencana, yang kemudian disebut dengan Destana (Perka No 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana).

Pada pelaksanaannya, sasaran dari program tersebut adalah tatanan masyarakat pada wilayah administratif desa atau kelurahan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, terdapat 83.931 wilayah administrasi yang setara dengan desa di seluruh Indonesia. Rinciannya meliputi 75.436 desa dan nagari (Sumatera Barat), 8.444 kelurahan, dan 51 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) (Statistik, 2018). Meskipun banyaknya jumlah wilayah administratif setingkat desa dan kelurahan, hal ini mendorong BNPB untuk bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaksanaan program Destana. Salah satu contoh keberhasilan program ini terlihat di Kabupaten Temanggung, yang telah menerapkan Destana sejak tahun 2014. Mereka berfokus pada pembentukan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Hingga saat ini, program Destana di Kabupaten Temanggung telah diterapkan di 13 desa yang tersebar di 11 kecamatan dengan tingkat risiko bencana yang beragam. (Rosa, 2019)

Kabupaten Temanggung terletak di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki topografi yang sangat beragam, termasuk dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung-gunung yang mengelilinginya. Wilayah ini memiliki kemiringan lahan yang bervariasi antara 0 hingga 70 derajat. Sebagai akibat dari karakteristik geografisnya, Kabupaten Temanggung termasuk dalam wilayah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, termasuk angin puting beliung, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan atau lahan, serta potensi erupsi dari gunung Sumbing dan Sindoro.

Tabel 1.1

Data Bnpb Bencana Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Kode	Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (jiwa)			Rumah (unit)				Kerusakan (unit)		
			Meninggal & Hilang	Luka-luka	Terdampak & mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Pendidikan
102	TANAH LONGSOR	28	0	2	244	4	3	61	0	0	1	0
105	PUTING BELIUNG	12	0	3	38	1	1	51	0	0	0	0
101	BANJIR	5	0	0	39	0	0	0	9	0	0	0
JUMLAH		45	0	5	321	5	4	112	9	0	1	0

Sumber: BNPB,2019

Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seperti yang tercantum dalam Tabel 1.1, tanah longsor merupakan jenis bencana alam yang sering terjadi sebanyak 28 kali. Hal ini sejalan dengan laporan (Suyitno, 2018) di mana BPBD Kabupaten Temanggung telah melakukan verifikasi wilayah, dan hasilnya menunjukkan bahwa dari 289 desa di wilayah Kabupaten Temanggung, sebanyak 103 desa memiliki risiko tinggi terhadap kejadian tanah longsor.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk upaya mitigasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi pasca bencana, merupakan tanggung jawab pemerintah. Komunikasi bencana berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan dan tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi bencana (Lestari et al., 2021). Melalui program Destana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung, melalui BPBD, telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam mitigasi bencana, memastikan bahwa masyarakat lebih siap dan tangguh dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Penelitian mengenai program Destana ini dilakukan pada Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, Desa Tleter Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, dan Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.

Destana merupakan program yang terkait erat dengan kegiatan komunikasi. Komunikasi harus berada di garis depan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat Indonesia, yang berperan sebagai subjek dan objek pembangunan (Barata et al., 2017) Keberhasilan program komunikasi dapat diukur jika tujuan komunikator, yaitu pesan atau informasi, diterima dengan baik oleh target sasaran. Tidak hanya diterima, tetapi juga mampu mengubah sikap audiens, baik melalui tindakan langsung maupun perubahan mindset sesuai

dengan harapan pengirim pesan. Untuk menilai efektivitas program komunikasi tersebut, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program.

Salah satu kegiatan evaluasi yang menjadi tugas dari seorang praktisi PR (Public Relations) adalah audit komunikasi. Kegiatan ini dilakukan dengan mengamati serta menganalisis secara detail mengenai proses dari sebuah program. Audit komunikasi yang efektif memerlukan riset yang mendalam baik terhadap hal-hal yang ada didalam maupun diluar organisasi yang menyangkut tentang program tersebut.

Alasan penting dilakukannya audit adalah untuk re-evaluasi atas pencapaian dari sebuah program, terlebih pada program kebencanaan, audit komunikasi sangat diperlukan karena keefektifan dari program tersebut menjadi vital dalam upaya meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Istilah audit pada hal ini mengartikan bahwa proses-proses komunikasi dapat diperiksa, dievaluasi dan diukur secara cermat, dan bila diperlukan dapat dilakukan diperbaiki secara sistematis, sehingga efektivitas maupun efisiensi komunikasi pun dapat meningkat.

Audit komunikasi dalam perusahaan atau organisasi, dibutuhkan untuk mempelajari secara detail bagaimana, apa dan kepada siapa perusahaan atau organisasi melakukan komunikasi. Dilaksanakannya audit komunikasi, dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang telah dilakukan, juga sebagai dasar untuk memutuskan dan perubahan apa yang perlu dilakukan. Audit komunikasi diperlukan untuk: (1) Mengetahui apakah program komunikasi berjalan dengan baik. (2) Membuat diagnosis tentang masalah yang terjadi atau berpotensi dan peluang yang mungkin terbuang. (3) Mengevaluasi kebijakan baru atau praktik komunikasi yang terjadi. (4) Memeriksa hubungan antara komunikasi dengan tindakan operasional lain. (5) Menyusun anggaran kegiatan komunikasi. (6) Menetapkan patok banding. (7). Mengukur kemajuan dan perkembangan dengan membandingkan dengan patok banding yang telah ditetapkan. (8) Mengembangkan atau melakukan restrukturisasi fungsi-fungsi komunikasi. (9) Membangun landasan dan latar belakang guna mengembangkan kebijakan dan program komunikasi baru (Purba, 2017).

Pada penelitian ini, program Destana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Temanggung pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan komunikasi kebencanaan yang ditujukan kepada masyarakat. Kaitannya dengan audit komunikasi adalah dengan dilaksanakannya audit komunikasi pada program ini, maka BPBD Kabupaten Temanggung sebagai operator program dapat mengetahui *preparation*, *implementation*, serta *evaluation* yang dihasilkan dari program tersebut. Audit komunikasi memberikan manfaat sebagai

gambaran BPBD dan Pemkab Temanggung dalam rangka untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pesan-pesan dari program Destana yang telah dilaksanakan, sehingga dapat diketahui pula kekurangan-kekurangan dari program tersebut yang nantinya diharapkan dapat diperbaiki dan menghasilkan program destana yang efektif dan lebih sempurna. Perlu dilakukannya audit karena masyarakat tidak dapat mengembangkan program secara mandiri setelah pelaksanaannya.

Melalui pemaparan latar belakang tersebut terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian Johari, (2016) mengenai “Audit Komunikasi Program Kampanye Earth Hour WWF Indonesia” membahas mengenai efektivitas keberhasilan tujuan kampanye serta sasaran organisasi *World Wildlife Found* (WWF) Indonesia. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2018) mengenai “Audit Komunikasi Program Startup Weekend” dengan tujuan untuk melakukan audit komunikasi untuk mengetahui efektivitas *Program Startup Weekend* pada *Cocowork at Clapham*.

Penelitian lain yang dilakukan (Lestari et al., 2019) berjudul “Audit of Disaster Communication on TV One Kabar Petang Program” dalam hal ini memberikan rekomendasi bahwa media perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas penyiaran pesan pada dimensi komunikasi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan utama disbanding penelitian-penelitian terdahulu terutama dalam hal konteks, fokus dan tujuan.

Gap penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada audit komunikasi dalam konteks kampanye atau program lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Destana yang memiliki implikasi langsung terhadap mitigasi bencana, yang merupakan aspek kritis dalam konteks Indonesia yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. *Novelty* pada penelitian ini terletak pada pentingnya audit komunikasi dalam upaya mitigasi bencana khususnya di Kabupaten Temanggung pada pelaksanaan program Destana. Program Destana berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan mitigasi risiko bencana di wilayah yang sangat beragam dalam hal topografi dan potensi bencana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem komunikasi yang telah dibangun sudah baik atau belum, serta untuk mengetahui apakah program Destana di Kabupaten Temanggung sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka penting untuk melaksanakan audit komunikasi.

METODOLOGI PENELITIAN

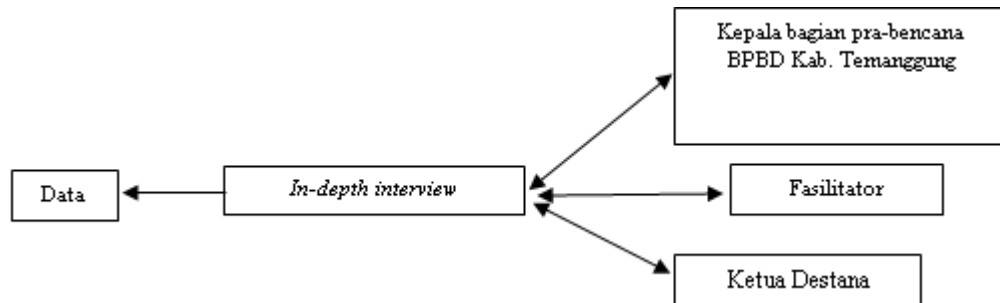
Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, peneliti memilih untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sebuah proses kerja, sehingga membutuhkan data yang lengkap serta mendalam melalui sebuah wawancara untuk mengetahui suatu hal yang tidak ditemukan dalam sebuah pengamatan. Penelitian dilakukan di BPBD Kabupaten Temanggung pada Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, Desa Tleter Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, dan Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan penelitian mulai dari Januari-Juni tahun 2019.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara informan yang dianggap paling tahu dan memberi banyak jawaban yang dibutuhkan atas pertanyaan atau masalah penelitian dan yang mendukung penelitian yaitu Karika Sari.,ST,M.Eng selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Temanggung sebagai informan kunci dan informan pendukung Budiharto selaku ketua forum pengurangan resiko bencana Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, Kasdi Selaku ketua forum pengurangan resiko bencana Desa Tleter Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, Wahono selaku ketua forum pengurangan resiko bencana Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, Faruq Hidayat selaku fasilitator Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, Jery Utomo selaku fasilitator Desa Tleter Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, Taofik Hasyim As'ari selaku fasilitator Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode Miles & Huberman, yang meliputi tiga langkah utama. Pertama, reduksi data, di mana data dirangkum, difokuskan pada hal penting, dan dicari tema serta pola. Kedua, penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk memudahkan pemahaman dan perencanaan langkah berikutnya. Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana data yang telah dirangkum dan disajikan dihubungkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji hasil penelitian dengan cara menganalisis data keseluruhan yang telah diperoleh berdasarkan wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumen-dokumen yang mendukung dalam

melakukan audit komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung dalam kegiatan Destana.



Gambar 1. Triangulasi Sumber Pengumpulan Data

Sumber: Olah Data Peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

BPBD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan kegiatan pembentukan Destana menggunakan Perka BNPB No.1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagai standar operasional prosedur (SOP). Pada pembahasan ini, peneliti mencoba untuk menghubungkan proses pelaksanaan kegiatan pembentukan Destana tahun 2019, melalui audit komunikasi dengan SOP kegiatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan model audit yang mengikuti panduan umum untuk audit komunikasi di instansi pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 27 Tahun 2011. Panduan tersebut mencakup enam belas aspek, termasuk gaya komunikasi, proses pengiriman pesan, media komunikasi, model komunikasi, saluran komunikasi, ketepatan waktu, frekuensi waktu, kejelasan pesan, transparansi dan kejujuran, partisipasi anggota instansi dan publik, umpan balik publik, peran dan fungsi anggota instansi pemerintah dalam berbagai kelompok, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, norma yang digunakan, gaya kepemimpinan dan kewenangan, serta penghargaan dan sanksi.

Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung ditujukan kepada pihak eksternal. BPBD adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi dalam program Destana. Prosedur pelaksanaan audit komunikasi berdasarkan pedoman umum di instansi pemerintahan dapat dilaksanakan dengan melihat serta menganalisis dimensi-dimensi audit komunikasi, adalah sebagai berikut:

Dimensi Proses Penyampaian Pesan. Proses penyampaian pesan dalam program ini dilakukan melalui komunikasi langsung. BPBD berinteraksi langsung dengan masyarakat desa yang menjadi peserta pembentukan Destana selama tiga hari pada awal program. Kegiatan ini mencakup sosialisasi, pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), dan pembentukan Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat desa.

Dimensi Gaya Komunikasi. Gaya komunikasi yang dominan digunakan oleh BPBD adalah gaya komunikasi terbuka. Masyarakat desa, sebagai pihak utama yang terlibat, diberikan kebebasan untuk mengemukakan gagasan dan pendapat mereka tanpa tekanan dari pihak lain. BPBD dan fasilitator desa berperan sebagai pengelola kegiatan yang memberikan arahan dan informasi terkait manajemen kebencanaan Destana melalui pesan-pesan yang disampaikan.

Dimensi Model Komunikasi Antara Instansi dengan Publiknya. Model komunikasi yang diterapkan adalah model komunikasi transaksional. Masyarakat sebagai audiens memberikan umpan balik sesuai dengan prinsip bahwa mereka adalah pelaku utama dalam program ini. BPBD dan masyarakat memiliki peran yang setara dalam komunikasi ini, dengan tanggung jawab yang sama terhadap efektivitas komunikasi dan dampaknya. Keduanya saling berkomunikasi dan berperan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki, menciptakan kolaborasi dalam menjalankan program Destana.

Dimensi Saluran Komunikasi. Berdasarkan data kegiatan pembentukan Destana di wilayah Kabupaten Temanggung pada tahun 2019, terlihat bahwa saluran komunikasi yang digunakan adalah saluran formal. Saluran komunikasi formal adalah kegiatan komunikasi yang isinya berhubungan dengan kinerja dan produktivitas dari sebuah organisasi. Lebih spesifiknya, saluran komunikasi formal yang digunakan dalam kegiatan pembentukan Destana oleh BPBD Kabupaten Temanggung di tahun 2019 berjenis komunikasi horizontal.

Menurut pengertiannya, komunikasi horizontal adalah jenis komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang berstatus atau berkedudukan sama. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang cukup penting untuk dilakukan pada organisasi, terlebih jika terdapat ketergantungan yang besar diantara keduanya. Tujuan dari komunikasi horizontal biasanya untuk melakukan tindakan persuasi, mengubah tindakan atau sekadar memberikan informasi.

Dimensi Media Komunikasi. Program Destana adalah suatu kegiatan komunikasi kebencanaan yang cara atau proses penyampaian pesan dilaksanakan secara langsung. Artinya media-media yang digunakan sebagai alat penyebaran pesan merupakan media yang sifatnya mendukung penyampaian pesan secara langsung pula. Seperti dengan penggunaan laptop dan

LCD proyektor sebagai media yang dapat memvisualisasikan materi tentang kegiatan pembentukan Destana, dan media tertulis yaitu buku laporan kegiatan yang merupakan hasil akhir dari kegiatan pembentukan tersebut. Buku laporan kegiatan merupakan salah satu bentuk *feedback* yang diberikan target sasaran program dalam hal ini masyarakat kepada pesan atau informasi yang diberikan oleh BPBD.

Dimensi Ketepatan Waktu. Destana merupakan suatu kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk mengantisipasi risiko kebencanaan. Pesan atau informasi mengenai kebencanaan menjadi pesan yang tidak akan pernah basi untuk disebarluaskan, mengingat kondisi wilayah yang rawan akan bencana. Sehingga, pesan-pesan kebencanaan dapat dilaksanakan kapan saja tanpa melihat keterbaruan dari peristiwa bencana.

Pelaksanaan kegiatan pembentukan Destana di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019, diselenggarakan pada bulan maret-juni. BPBD Kabupaten Temanggung melalui Kartika, menjelaskan bahwa tidak ada alasan khusus terkait dengan pelaksanaan program di bulan tersebut. Kartika menambahkan, pemilihan bulan maret sebagai awal waktu kegiatan, merupakan ketentuan dari BPBD Kabupaten Temanggung yang didasarkan pada jenis program Destana sebagai kegiatan atau program unggulan, sehingga dilaksanakan pada awal tahun.

Dimensi Frekuensi Waktu. Destana merupakan suatu program yang dirancang dalam mengurangi resiko bencana yang ada di masyarakat, sehingga sifat dari program tersebut adalah menjadi urusan bersama. Perlu adanya transparansi, kejujuran, dan saling percaya dalam kegiatan ini, khususnya oleh BPBD Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, dikarenakan pada pelaksanaannya masyarakatlah yang menjadi pelaku utama, mereka adalah pihak yang menentukan, merencanakan dan melaksanakan program tersebut. Sehingga, dibutuhkan kegiatan komunikasi yang intens untuk membangun faktor-faktor tersebut.

Pada pelaksanaan kegiatan pembentukan Destana di Kabupaten Temanggung, kegiatan dilaksanakan selama tiga bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Audit Komunikasi Frekuensi Waktu

Desa	Waktu Pembentukan	Keterangan
------	-------------------	------------

Kedungumpul	3 Bulan	3 hari oleh BPBD Kabupaten Temanggung87 hari oleh fasilitator, dengan rincian dalam seminggu mengadakan pertemuan 3 kali tatap muka
Tleter	3 Bulan	3 hari oleh BPBD Kabupaten Temanggung87 hari oleh fasilitator, dengan rincian dalam seminggu mengadakan pertemuan 2 kali tatap muka
Kemloko	3 Bulan	3 hari oleh BPBD Kabupaten Temanggung87 hari oleh fasilitator, dengan rincian dalam seminggu mengadakan pertemuan 2 kali tatap muka

Sumber: Olah Data Peneliti, 2019

Dari data di atas, terlihat adanya perbedaan jumlah frekuensi pertemuan fasilitator dan masyarakat di tiap desa pembentukan Destana. Fasilitator dari Desa Tleter menjelaskan bahwa para fasilitator tidak mempunyai hak dalam inisiatif pertemuan dengan masyarakat, masyarakat sendirilah yang menentukan kapan, berapa lama, dan dimana dilaksanakannya pertemuan dengan fasilitator untuk membahas Destana.

Dimensi Kejelasan Arti Pesan. Pelaksanaan kegiatan pembentukan program Destana di Kabupaten Temanggung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menerapkan beberapa prinsip penting dalam komunikasi. Pertama, pesan yang disampaikan harus bersifat umum, mudah dipahami oleh semua orang, dan disesuaikan dengan latar belakang budaya dan bahasa masyarakat setempat. Kedua, pesan harus jelas, fokus pada tujuan komunikasi, dan mampu menghindari risiko kesalahpahaman. Ketiga, BPBD menggunakan bahasa Jawa halus untuk mempermudah penerimaan pesan oleh masyarakat yang memiliki latar belakang budaya Jawa. Keempat, pesan yang disampaikan cenderung bersifat positif, mengajak masyarakat untuk mencari solusi terhadap permasalahan bencana di wilayah mereka.

Dimensi Keterbukaan dan Kejujuran. Komunikasi antara BPBD Kabupaten Temanggung dan masyarakat berlangsung dengan cukup baik. Komunikasi terbuka dan lancar antara BPBD, fasilitator, dan masyarakat desa pembentukan. Namun, terdapat kendala ketika fasilitator bekerja sama dengan perwakilan masyarakat desa (FPRB), karena tidak semua anggota FPRB memiliki waktu dan kesempatan untuk berkomunikasi dan berbagi sesuai

dengan tujuan pembentukan Destana. Hal ini disebabkan oleh kesibukan masing-masing anggota FPRB.

Dimensi Partisipasi Anggota Instansi dan Publik. Pada tahun 2019, BPBD Kabupaten Temanggung melaksanakan program Destana di tiga desa, yaitu Desa Kedungumpul, Desa Tleter, dan Desa Kedungumpul. Pada pelaksanaan program ini, BPBD Kabupaten Temanggung mendapatkan bantuan dari fasilitator yang telah bersertifikasi dan terlatih dalam program Destana. Fasilitator ini telah menjalani pelatihan kerjasama antara BPBD Kabupaten Temanggung dan BNPB. Tugas utama fasilitator adalah membimbing masyarakat, khususnya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk selama kegiatan pembentukan Destana. FPRB sendiri adalah organisasi yang mewakili masyarakat desa secara umum dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah mereka.

Dimensi Umpan Balik. Pada kegiatan pembentukan Destana 2019 di wilayah Kabupaten Temanggung, BPBD setempat menjadi komunikator dan masyarakat pada desa pembentukan menjadi komunikan dari kegiatan komunikasi ini. Dari data wawancara yang diperoleh melalui para narasumber, diketahui bahwa umpan balik yang diberikan oleh komunikan adalah umpan balik positif. Artinya masyarakat pada desa pembentukan Destana dapat memahami, bersedia membantu dan bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan program Desa Tangguh Bencana di wilayahnya.

Dimensi Peran dan Fungsi Anggota Instansi dalam Berbagai Kelompok. Peran dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung dengan fasilitator, memiliki peran dan fungsi yang sama pentingnya. BPBD Kabupaten Temanggung dalam hal ini sebagai operator kegiatan harus memastikan bahwa program tersebut terlaksana di wilayahnya dengan baik. Tugas BPBD untuk mendorong, memfasilitasi serta memberikan dukungan sumber daya kepada masyarakat, salah satunya dengan memfasilitasi fasilitator di desa pembentukan Destana. Fasilitator menjadi “pembantu” BPBD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan kegiatan pembentukan Destana di wilayahnya.

Dimensi Pemecahan Masalah dan Pembuat Keputusan. Pada pelaksanaan program Destana oleh BPBD Kabupaten Temanggung tahun 2019, proses komunikasi tidak langsung menggambarkan dimensi pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Namun, dimensi ini sebenarnya tercermin dalam isi program Destana itu sendiri. Program Destana adalah inisiatif untuk mengatasi masalah bencana dengan berbasis pada kemandirian masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi terhadap masalah bencana dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang merupakan bagian integral

dari program Destana. Hasil identifikasi masalah dan solusi yang ditemukan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah desa, sesuai dengan prinsip masyarakat sebagai pelaku utama dalam program Destana.

Dimensi Norma-norma yang Digunakan. Berdasarkan data-data yang peneliti temukan, norma yang dipakai pada kegiatan pembentukan Destana tahun 2019 di Kabupaten Temanggung adalah norma eksplisit. BPBD Kabupaten Temanggung menggunakan perka BNPB No. 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagai peraturan tertulis yang mengikat bagi target sasarannya yakni masyarakat. Dengan perka tersebut, masyarakat terikat atas kegiatan-kegiatan atau komponen-komponen yang harus dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan bencana di wilayah mereka.

Dimensi Gaya Kepemimpinan dan Kewenangan. Gaya kepemimpinan dan kewenangan adalah aspek penting dalam keberhasilan kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Terdapat berbagai tipe kepemimpinan yang mencerminkan gaya dan kewenangan kepemimpinan, seperti tipe otokratik, tipe paternalistik, tipe kendali bebas atau masa bodoh, tipe militeristik, tipe kharismatik, tipe demokratik, dan tipe *pseudo*-demokratis.

Berdasarkan analisis data dan wawancara, terdapat temuan bahwa BPBD Kabupaten Temanggung menerapkan tipe kepemimpinan kendali bebas atau masa bodoh dalam pembentukan program Destana tahun 2019. Hal ini tercermin dalam variasi hasil kegiatan yang berbeda-beda di setiap lokasi pembentukan Destana. BPBD Kabupaten Temanggung tampaknya tidak memberikan standarisasi yang jelas terkait dengan hasil yang diharapkan dari pembentukan Destana, sehingga instansi tersebut memberikan kewenangan lebih kepada pihak terkait dalam pelaksanaan program tersebut.

Dimensi Penghargaan dan Sanksi. Penghargaan adalah bentuk apresiasi, baik berupa materi maupun non materi, yang diberikan sebagai bentuk motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan menghargai prestasi. Sanksi, sebaliknya, adalah tindakan yang bertujuan untuk mengurangi frekuensi perilaku tertentu. Namun, dalam pelaksanaan program Destana tahun 2019 oleh BPBD Kabupaten Temanggung, tidak ditemukan penghargaan atau sanksi yang diberikan kepada pihak internal BPBD atau masyarakat sebagai target sasaran program tersebut. Meskipun demikian, BPBD Kabupaten Temanggung memiliki rencana untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat sebagai target sasaran dalam bentuk kegiatan perlombaan ketangguhan bencana. Penelitian terkait telah menunjukkan bahwa insentif atau sanksi dapat meningkatkan partisipasi dan efektivitas program mitigasi bencana (Photiou, 2021).

Berdasarkan dimensi frekuensi waktu, ditemukan bahwa program Destana yang dilaksanakan selama 3 bulan belum sesuai dengan apa yang digunakan dalam SOP kegiatan. Waktu ideal pembentukan Destana yaitu selama enam bulan yang dilaksanakan secara tatap muka intens. Realitanya BPBD Kabupaten Temanggung hanya melaksanakan dalam tiga bulan, dengan waktu tersebut kegiatan terkesan sangat pendek bagi program yang mempunyai tujuan jangka panjang. Photiou (2021) menyatakan bahwa waktu yang tidak memadai seringkali menghambat pencapaian tujuan jangka panjang dalam program mitigasi bencana

Mengenai penggunaan fasilitator dalam pelaksanaan program Destana sebagai tindakan improvisasi oleh BPBD Kabupaten Temanggung untuk melancarkan komunikasi dengan masyarakat desa. Ini dianggap efektif karena kegiatan Destana berlangsung dalam waktu yang lama dan membutuhkan pendampingan intensif. Selanjutnya, berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti menyimpulkan dimensi gaya kepemimpinan dan kewenangan yang digunakan BPBD dalam melaksanakan kegiatan Destana bertipe kendali bebas atau masa bodoh. Tipe ini melepas kontrol atas hasil kegiatan dalam hal ini Destana kepada audiencenya. Artinya, masyarakatlah yang dapat menentukan perencanaan-perencanaan dalam rangka penanggulangan bencana seperti apa tanpa adanya intervensi dari operator kegiatan yaitu BPBD Kabupaten Temanggung. Peneliti menilai gaya kepemimpinan ini kurang cocok dengan tujuan program yang efektif, dikarenakan perlu adanya masukan dari ahli dalam hal ini BPBD mengenai kebijakan atau perencanaan yang telah dibuat oleh masyarakat.

Kegiatan pembentukan Destana tahun 2019 di Kabupaten Temanggung, terdapat beberapa kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan. Salah satunya adalah bahwa komponen-komponen Destana belum dilaksanakan secara optimal di ketiga desa yang menjadi fokus penelitian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Temanggung setelah kegiatan berlangsung. Evaluasi yang dimaksud seharusnya mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan program serta penilaian terhadap pencapaian hasil program sesuai dengan indikator atau target yang telah direncanakan. Selain itu, SOP kegiatan pembentukan Destana mengacu pada Perka BNPB No.1 Tahun 2012, yang seharusnya membantu memastikan kelancaran pelaksanaan program. Namun, implementasinya belum optimal, dan pemantauan dilakukan terutama selama kegiatan berlangsung, sementara pemantauan pasca pelaksanaan kurang dilakukan secara intens. Demikian pula, evaluasi belum terlaksana hingga saat ini, baik oleh BPBD Kabupaten Temanggung maupun oleh organisasi FPRB di ketiga lokasi pembentukan Destana. Evaluasi dianggap penting untuk menilai keberhasilan program dan memberikan masukan untuk

perbaikan di masa depan. Sebagai alternatif, BPBD mengukur keberhasilan kegiatan pembentukan Destana melalui indikator-indikator perencanaan yang dimasukkan ke dalam RPJMDes.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lain dalam pendekatannya terhadap BPBD Kabupaten Temanggung sebagai subjek penelitian, yang masih jarang dieksplorasi dalam penelitian ilmiah. Melalui hasil penelitian ini, dapat diambil beberapa rekomendasi, seperti perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara BPBD dan masyarakat desa, melaksanakan evaluasi dan pemantauan yang lebih intensif pasca pembentukan program, dan memperhatikan pengkategorian desa tangguh untuk memudahkan masyarakat dalam melanjutkan program secara mandiri. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pelaksanaan program Destana dan komunikasi dalam konteks penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Temanggung.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan Destana secara keseluruhan telah mematuhi panduan yang telah ditetapkan, yaitu Pedoman Umum Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Perka BNPB No 1 Tahun 2012. Hal ini terlihat dari pengaplikasian prinsip-prinsip Destana dan komponen-komponen Destana yang dijalankan, serta hasil audit komunikasi yang sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kekurangan yaitu pada tahap pasca pelaksanaan, BPBD Kabupaten Temanggung tidak melaksanakan kegiatan evaluasi, yang seharusnya telah diatur dalam SOP Destana. Evaluasi program Destana mencakup penilaian dan klasifikasi desa pembentukan ke dalam kategori Destana madya, utama, atau pratama. Selain itu, pemantauan kegiatan penanggulangan bencana juga tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat selama pembentukan kegiatan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas program Destana, perlu diperkuat koordinasi, komunikasi, serta pelaksanaan evaluasi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Hal ini akan membantu masyarakat desa dalam mengembangkan kemampuan mereka secara berkelanjutan dan lebih mandiri dalam menghadapi potensi bencana.

Rekomendasi untuk BPBD Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan efektivitas program Destana adalah BPBD Kabupaten Temanggung perlu melakukan audit komunikasi dengan mengacu pada model atau teori audit komunikasi yang ada untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam komunikasi. Standarisasi pencapaian Destana di wilayahnya perlu ditetapkan agar program ini efektif di berbagai lokasi. Pemantauan dan evaluasi program

Destana setelah pembentukannya sangat penting untuk menilai pelaksanaan rencana penanggulangan bencana oleh masyarakat dan mengukur tingkat keberhasilan program. Selain itu, BPBD Kabupaten Temanggung harus selalu mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) program Destana yang diatur dalam Perka BNPB No.1 Tahun 2012. Dengan mengikuti rekomendasi ini, diharapkan program Destana dapat lebih efisien dan berhasil dalam menjalankan misinya.

ACKNOWLEDGMENT

Terima kasih kepada BPBD Kabupaten Temanggung atas dukungan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan penelitian ini. Informasi dan bantuan yang diberikan sangat berharga bagi kelancaran penelitian. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta atas dukungan akademik dan fasilitas yang disediakan. Bimbingan dan bantuan dari dosen serta staf administrasi sangat membantu dalam penyusunan jurnal ini.

REFERENSI

- Barata, G. K., Lestari, P., & Hendariningrum, R. (2017). Model Komunikasi Untuk Penanggulangan Bencana Gunung Merapi Melalui Aplikasi Plewengan. *Journal Communication Spectrum*, 4(2), 183–198.
- Johari, E. (2016). Audit Komunikasi Program Kampanye “Earth Hour” World Wildlife Fund for Nature Indonesia. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 1–20.
- Lestari, P., Astari, D. W., & Asyrafi, A. L. (2019). Audit of Disaster Communication on TVOne Kabar Petang Program. *Jurnal ISKI*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25008/jkiski.v4i2.332>
- Lestari, P., Teguh Paripurno, E., Surbakti, H., & Mahardika Pratama, D. (2021). Model Komunikasi dan Informasi Terpadu dalam Pengelolaan Bencana di Kabupaten Karo Berbasis Web. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 47–62. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol16.iss1.art4>
- Nabila, T. A. (2018). *Audit Komunikasi Program Startup Weekend (Studi Kuantitatif Mengenai Audit Komunikasi Program Startup Weekend yang Diselenggarakan oleh Cocowork at Clapham)*. Universitas Sumatera Utara.
- Photiou, E. (Steve). (2021). Leadership and Management in Disasters--Command, Control, Coordination, Communication. In E. Pikoulis & J. Doucet (Eds.), *Emergency Medicine, Trauma and Disaster Management: From Prehospital to Hospital Care and Beyond* (pp. 611–624). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34116-9_49
- Purba, T. E. N. B. (2017). Audit Komunikasi Program Coorporate Social Responsibility (Studi Deskriptif Kualitatif Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pelabuhan Indonesia I Persero, Medan). *Null*.
- Rosa, A. (2019). BPBD Temanggung Bentuk Destana untuk Kurangi Risiko Bencana. *Sindonews.Com*.
- Statistik, B. P. (2018). *Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018*. Badan Pusat Statistik.
- Suyitno, H. (2018). 103 desa/kelurahan Temanggung rawan bencana longsor. *Antara*.